

**URGENSI DAN TATA KELOLA SUPER HOLDING BUMN: STUDI
KOMPARATIF DANANTARA INDONESIA, TEMASEK HOLDINGS
SINGAPURA, DAN IMDB MALAYSIA**

***URGENCY AND GOVERNANCE OF STATE-OWNED SUPERHOLDINGS:
A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA'S DANANTARA,
SINGAPORE'S TEMASEK HOLDINGS, AND MALAYSIA'S IMDB***

Nidia Yustisia Kartika, Muhammad Bilal Prasetyo, Mustofa Ponco Wibowo

Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : nidiayustisiakartika@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Kartika, Nidia Yustisia, Muhammad Bilal Prasetyo dan Mustofa Ponco Wibowo. *Urgensi dan Tata Kelola Super Holding BUMN: Studi Komparatif Danantara Indonesia, Temasek Holdings Singapura, dan IMDB Malaysia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tata kelola Danantara, Temasek, dan IMDB. Fokus kajian meliputi aspek dasar hukum, status kepemilikan, dan struktur organisasi dan sistem pertanggungjawaban. Hasil menunjukkan bahwa meskipun Danantara memiliki dasar hukum kuat, risiko intervensi politik dan lemahnya pengawasan masih menjadi tantangan. Temasek berhasil menjaga independensinya melalui struktur hukum dan organisasi yang tegas, sementara IMDB menjadi contoh kegagalan akibat lemahnya tata kelola dan minimnya transparansi. Studi ini menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang bebas intervensi politik untuk keberhasilan super holding. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi dalam perumusan model kelembagaan investasi negara yang ideal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: BUMN, Danantara, Super holdings, Temasek, IMDB

ABSTRACT

This study aims to compare the governance between Danantara, Temasek, and IMDB. The focus on the study includes legal basis, ownership status, organizational structure, and accountability system. Danantara has a strong legal basis but remains vulnerable to political influence and weak oversight. Temasek has maintained its independence through a strong legal and organizational structure, while IMDB exemplifies governance failure due to weak oversight and lack of transparency. This study highlights the need for transparency, accountability, and political neutrality to ensure the success of state-owned superholdings and offers insights for developing a sustainable state investment model.

Keywords: BUMN, Danantara, Super holdings, Temasek, IMDB

A. PENDAHULUAN

Perusahaan induk (*holding company*) yang digagas pemerintah sebagai langkah untuk optimalisasi dan pembangunan nasional demi pemberdayaan aset Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan BUMN) dan semua modalnya menjadi akar dari didirikannya Daya Anagata Nusantara (selanjutnya disebut dengan Danantara) berdasarkan analisis dari Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (selanjutnya disebut dengan PP BPI Danantara).¹ Entitas *holding company* tersebut mengelola 7 BUMN induk dengan anak cucu perusahaannya sejumlah 844 entitas, baik berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan PT) maupun Perusahaan Umum (selanjutnya disebut dengan Perum) dengan nilai aset mencapai US\$ 900 miliar serta akan meningkat sejalan terhadap bertambahnya aset yang dikelola, hal ini menempatkan Danantara sebagai *super holding*.²

Danantara sebagai *super holding* mengambil rujukan keberhasilan melalui Temasek *Holdings* di Singapura yang memiliki karakteristik akuntabel, transparan, dan profesional. Namun terdapat pembandingan dengan evaluasi kegagalan yang dialami oleh *1Malaysia Development Berhad* (selanjutnya disebut dengan 1MDB) sebagai sebuah *holdings* penuh skandal disebabkan karena mega korupsi dan kurangnya pengawasan dari pihak eksternal.³

Sebagai entitas yang mengelola kekayaan publik, Danantara wajib untuk bertanggung jawab kepada publik atas semua kebijakannya dan tindakannya.

¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara*, PP No. 10 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.26, TLN No.7098, Ps.1 ayat (6) dan (7). Pasal 1 ayat (6) PP BPI Danantara, “Perusahaan Induk Investasi yang selanjutnya disebut *Holding* Investasi adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan dividen dan/ atau pemberdayaan aset BUMN serta tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri dan/ atau Badan”. Pasal 1 ayat (7) PP BPI Danantara, “Perusahaan Induk yang selanjutnya disebut *Holding* Operasional adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN serta kegiatan usaha lain.”

² Akbar Evandio, *844 Perusahaan BUMN Diambil Alih Danantara, Termasuk Aset Strategis*, diakses dari <https://market.bisnis.com/read/20250428/192/1872743/844-perusahaan-bumn-diambil-alih-danantara-termasuk-aset-strategis>, diakses pada 24 Juni 2025, jam 12.06 WIB.

³ Ali Maksum, *1MDB (1Malaysia Development Berhad), Scandal, and Its Impact on Malaysian Domestic Politics*, *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol.11 No.2, (Oktober 2020), p.199.

Pertanggungjawaban sebuah lembaga publik di Indonesia dilakukan melalui penyerahan laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawasan oleh legislatif, yaitu DPR.⁴ Namun, sampai sekarang belum terdapat undang-undang yang memaksa Danantara untuk tunduk pada mekanisme tersebut. Hal ini diperkuat oleh temuan studi yang menyatakan bahwa tidak ada ketentuan eksplisit yang mengatur kewajiban Danantara untuk menyampaikan laporan kepada DPR, menyerahkan laporan keuangan untuk diperiksa oleh BPK, maupun melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan investasi.⁵ Ketiadaan laporan keuangan yang dipublikasikan secara berkala mencerminkan rendahnya akuntabilitas informasi publik. Selain itu terdapat peristiwa rangkap jabatan sebagai menteri pula sebagai pengelola Danantara yang bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut dengan UU Kementerian)⁶. Hal ini memiliki keterkaitan terhadap menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (selanjutnya disebut dengan IHSG) dengan drastis dalam sebulan pertama pasca peluncuran Danantara.⁷

Komparasi terkait tata kelola, baik berdasar intervensi politik, mekanisme kontrol, pertanggungjawaban, maupun transparansi yang berlainan antara Temasek di Singapura dan 1MDB di Malaysia tentu memegang peranan vital atas langkah yang seharusnya ditempuh oleh Danantara dengan tujuan agar tercegah dari kegagalan yang dialami oleh 1MDB dan tercapainya keberhasilan layaknya Temasek. Namun belum terdapat temuan yang secara spesifik membahas hal itu.

⁴ Joel Axel Bernard, Agus Suprajogi, *Status Hukum Danantara Berdasarkan Undang-Undang BUMN dalam Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.5, No.2 (Agustus 2025), p.2223.

⁵ Putri Ni'matul Maula, Elsha Victoria Daniel, Muhammad Hafizh Athallah Irawan, Samuel Rainhard Lumban Gaol, *Pengawasan dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Hukum Statuta, Vol.4, No.2 (April 2025), p.134-135.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*, UU No. 61 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.225, TLN No.6994, Ps.23, berbunyi, "Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisararis atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah."

⁷ Mudriko Ahyulindo, Muhammad Ilham Rezki Wijaya, Indri Natalia dan Sri Handayani, *Dampak Kebijakan Hukum Mengenai Danantara Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2, No.4 (April 2025), p.124.

Hal ini mengemukakan bahwa terdapat gap yang spesifik membahas mengenai urgensi dan komparasi yang berfokus pada dasar hukum, status kepemilikan yang menentukan kewenangan dan posisi dari *holdings* tersebut, dan struktur organisasi dan pertanggungjawaban korporasi yang seharusnya dianalisis secara komprehensif sekaligus mendorong adanya suatu penelitian untuk mengisi gap tersebut tentang langkah tata kelola seharusnya yang sesuai dengan Pasal 1A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (selanjutnya disebut dengan UU BUMN) yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan tata pengelolaan perusahaan yang baik.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan secara kritis tata kelola *super holding* BUMN antara Danantara, Temasek, dan 1MDB dengan fokus pada analisis legalitas dasar hukum,⁹ status kepemilikan, dan struktur organisasi dan sistem pertanggungjawaban. Metode yang dipergunakan yaitu normatif, dimana disebut juga penelitian hukum doktrinal, studi dokumen, ataupun penelitian kepustakaan.¹⁰ Pendekatan yang diterapkan yaitu komparatif,¹¹ dengan pendekatan tersebut studi ini diharap mampu berkontribusi untuk perumusan model kelembagaan *super holding* yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola negara di masa depan.

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Dibentuknya Badan Pengelola Danantara sebagai *Super Holdings* BUMN

Dalam dinamika transformasi ekonomi yang berada dalam tekanan arus era globalisasi. Dalam implementasinya, *Sovereign Wealth Fund* (selanjutnya disebut dengan SWF) telah banyak diterapkan di dunia, misalnya *SAFE Investment Company* (selanjutnya disebut dengan SAFE IC) serta *China Investment Company*

⁸ Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.1 Tahun 2025, LN. 2025 No.25, TLN No.7097, Ps.1A berbunyi, “BUMN berasaskan demokrasi ekonomi yang meliputi prinsip: (a) kebersamaan; (b) efisiensi berkeadilan; (c) berkelanjutan; (d) berwawasan lingkungan; (e) menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan (f) tata kelola perusahaan yang baik.”

⁹ Fajar Muchti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, p.185.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, p.45.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

(selanjutnya disebut dengan CIC) yang dimiliki China, *Public Investment Fund* (selanjutnya disebut dengan PIF) dari Arab Saudi, *Abu Dhabi Investment Authority* (selanjutnya disebut dengan ADIA) dari Uni Emirat Arab, *Kuwait Investment Authority* (selanjutnya disebut dengan KIA) dari Kuwait, *National Investment and Infrastructure Fund* (selanjutnya disebut dengan NIIF) dari India, serta *Government Pension Fund Global* (selanjutnya disebut dengan GPF) dari Norwegia.¹² Dengan tuntutan ekonomi yang demikian kompleks dan telah banyak diterapkan oleh negara-negara lain, maka Presiden Prabowo mengambil langkah besar, yaitu dengan meluncurkan Danantara sebagai *super holding* yang mengelola kekayaan negara.¹³

Namun Indonesia sendiri sebelumnya telah mempunyai *Indonesia Investment Authority* (selanjutnya disebut dengan INA). Hal ini dikembangkan oleh Danantara dengan pengelolaan sebanyak 7 BUMN yang dikelola oleh BPI Danantara berdasarkan *Asset Under Management* (selanjutnya disebut dengan AUM) yang meliputi (1) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), (2) PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk (BBRI), (3) PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk (BBNI), (4) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), (5) PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) (Persero), (6) PT Pertamina (Persero), dan (7) *Mining Industry Indonesia* (MIND ID) atau PT Mineral Industri Indonesia (Persero) dengan anak cucunya sejumlah 844 entitas yang asetnya senilai US\$900 miliar atau senilai dengan 14.597.924.490.000.000,00 (kurs Rp16.219,92/USD tertanggal 30 Juni 2025) dan diperkirakan akan menjadi peringkat empat dengan SWF terbesar di dunia.¹⁴ Nominal yang besar tersebut dapat membawa akibat yang fatal apabila tidak dikelola dengan profesional, terstruktur, dan akurat.¹⁵

¹² Deshandra Yusuf Siswan Atmadja, *Urgensi Aturan Turunan Danantara & Optimalisasi Lembaga Aset Negara*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250220190258-14-612359/urgensi-aturan-turunan-danantara-optimalisasi-lembaga-aset-negara>, diakses pada 30 Juni 2025, jam 13.53 WIB.

¹³ Zahira, I., Hasbi, M. Z. N. dan Faris, S, *Strengthening Economic and Development Relations Transformation Efforts Towards Golden Indonesia 2045*, *Journal of Islamic Economics and Business Ethics*, Vol.1, No.3 (2024), p.125-135.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ CNN Indonesia, *Daftar 7 BUMN Raksasa yang Akan Dikelola Danantara*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241122065606-92-1169378/daftar-7-bumn-raksasa-yang-akan-dikelola-danantara>, diakses pada 30 Juni 2025, jam 13.12 WIB.

Eksistensi *super holding* tersebut disandarkan pada UU BUMN dengan pengesahan melalui Rapat Paripurna DPR RI.¹⁶ Hal ini sebagai langkah konsolidasi pondasi ekonomi agar aset BUMN dapat dikelola secara optimal. Pra peluncuran Danantara, berbagai aset vital BUMN dikelola secara tidak efisien, maka Danantara dibentuk atas dasar efisiensi, profitabilitas, transparansi, dan akuntabilitas dengan pengawasan penuh.¹⁷ Fungsi Danantara merupakan badan pengelola investasi yang memiliki peran dalam peningkatan daya saing yang berbasis investasi strategis yang berfokus di beberapa sektor vital dan dapat bersaing di kancah global. BUMN sebagai badan pengelola investasi diberikan wewenang yang krusial dalam mengelola beberapa aset yang sebelumnya terfragmentasi di berbagai BUMN.¹⁸

Keberadaan Danantara akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keuntungan yang diperoleh dari investasi Danantara akan menjadi sumber pendapatan baru negara sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pajak dan utang luar negeri.¹⁹ Selain itu, perusahaan-perusahaan dalam negeri dapat memperoleh investasi dari Danantara dalam hal kebutuhan modal untuk meningkatkan inovasi dan daya saing global. Kemudian, masyarakat juga akan merasakan dampak secara langsung, yaitu berupa penyediaan lapangan pekerjaan yang baru, peningkatan pelayanan publik, dan penyelenggaraan program sosial yang lebih luas.²⁰ Danantara juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam hal pengelolaan BUMN di Indonesia. Dalam hal ini, Danantara memastikan semua BUMN dijalankan sesuai dengan prinsip *good corporate governance* dan diperlukan transparansi serta akuntabilitas yang jelas terhadap proyek-proyek yang akan dibiayai.²¹

¹⁶ M.Y.S. Priyono, dkk., *Implikasi Hukum dan Politik dalam Pembentukan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Nasional*, Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2025), p.5.

¹⁷ Tuhombowo Wau, *Danantara: Menyulam Harapan di Tengah Jebakan Sistemik Indonesia*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/tuhombowo/683f5016ed641503c428fa03/danantara-menyulam-harapan-di-tengah-jebakan-sistemik-indonesia>, pada 30 Juni 2025, jam 13.40 WIB.

¹⁸ Adhi Setyo Prabowo, dkk., *Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia*, Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, Vol.13, No.1 (April 2020), p.1-6.

¹⁹ Rinaldi Rinaldi, Suwito Suwito dan Guntur Eko Saputro, *Economic Program Policy BUMN In Increasing Economic Growth In Indonesia*, International Journal Of Humanities Education and Social Sciences, Vol.4, No.2 (2024).

²⁰ Steph Subanidja, *Danantara dan Upaya Menghidupkan Potensi Aset Negara*, diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-7792739/danantara-dan-upaya-menghidupkan-potensi-aset-negara>, diakses pada 30 Juni 2025, jam 14.05 WIB.

²¹ I. Rezy dkk., *Super Holding of State-Owned Enterprize (Soes) to Realize A Healthy Company Based on The Principles of Good Corporate Governance to Create the Prosperity of All Indonesian People*, Journal of Law and Sustainable Development, Vol.12, No.1 (2024).

Sementara itu, Regulasi menjadi pilar utama dan fundamental dalam keberhasilan pengelolaan upaya strategis pemerintah, terutama dalam sektor ekonomi yang krusial serta vital, Danantara yang dicanangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset BUMN sehingga terjadi peningkatan pembangunan nasional.²² Tentu dalam penerapan Danantara yang harus melalui audit yang terstruktur dan ketat agar tidak terdapat celah koruptif. Hal tersebut harus dilandaskan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut dengan UU KKN).²³

2. Komparasi antara Danantara, Temasek, dan IMBD

a. Dasar Hukum

Super holding selayaknya dipandang sebagaimana korporasi yang membutuhkan legalitas atau dasar hukum dalam pengelolaannya oleh pemerintah agar tidak melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). Danantara sebagai *super holding* Indonesia didasarkan atas amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945),²⁴

²² Susanto Machmud, Y. ., ., N., Lukman Irwan, A. ., ., S. dan Ilmi Utami Irwan, A, *The Implementation of Good Governance Principles in the Asset Management of Regional-Owned Enterprises of South Sulawesi Province*, KnE Social Sciences, Vol.8, No.17 (2023), p.840–856. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14182>

²³ Bunga Ananda Pratama dan Sri Handayani, *Konstruksi Yuridis Danantara Indonesia: Transformasi Tata Kelola Kekayaan Negara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Kontemporer*, Jurnal Analisis Hukum, Vol.8, No.1 (2025), p.35.

²⁴ Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps.5 ayat (2) berbunyi, “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”

Ps.20 UUD NRI 1945 berbunyi “(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.”

Ps.21 UUD NRI 1945 berbunyi, “(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. (2) Rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dibahas bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Ps.33 UUD NRI 1945 berbunyi, “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut dengan TAP MPR) Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja) kemudian didelegasikan pada UU BUMN.²⁵ Ketentuan pelaksanaan dari UU BUMN terdapat terhadap PP BPI Danantara sebagai landasan dalam efektivitas pengelolaan BUMN. Dalam hal ketentuan terkait pengelola Pengangkatan serta pemberhentian Danantara dilaksanakan Presiden sesuai Pasal 6 ayat (2) PP BPI Danantara.²⁶ Pengelola tersebut nyatanya telah dilaksanakan melalui Keputusan Presiden (selanjutnya disebut dengan Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia.²⁷

Sementara itu, Temasek bukan sebuah produk hasil legislatif layaknya Danantara. Dengan kata lain, Temasek bukan dilahirkan karena adanya suatu regulasi atau kerangka hukum tertentu.²⁸ Dalam undang-undang perusahaan Singapura, yaitu *Companies Act* 1967 hanya disebutkan mengenai kriteria bagaimana suatu badan hukum dapat dianggap sebagai *Ultimate Holding Company*, bukan menyebutkan secara eksplisit pembentukan suatu badan hukum berdasarkan undang-undang tersebut untuk menjadi sebuah *Ultimate Holding Company*.²⁹

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”

²⁵ Vardhan, R, *National Law Development Perspective on Job Creation Law: A Critique*. Arena Hukum, Vol.17, No.2 (2024), p.428-447. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2024.01702.11>

²⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara*, PP No. 10 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.26, TLN No.7098, Ps.6 ayat (2) berbunyi, “Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.”

²⁷ Willa Wahyuni, *Prabowo Teken Keppres Danantara, Ini Susunan Pengurusnya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/prabowo-teken-keppres-danantara--ini-susunan-pengurusnya-lt67bc730b01ed8/>, diakses pada 25 Juni 2025, jam 12.43 WIB.

²⁸ Fabian Jonathan, Fajar Sugianto dan Michael, T, *Comparative Legal Analysis On The Competence of The Indonesia's Financial Services Authority And Monetary Authority of Singapore On The Enforcement of Insider Trading Laws*, Journal of Central Banking Law and Institutions, Vol.2, No.2 (2023), p.283–300. <https://doi.org/10.21098/jcli.v2i2.24>

²⁹ *Companies Act 1967*, Ps.5A berbunyi, “For the purposes of this Act, a corporation is the ultimate holding company of another corporation if — (a) the other corporation is a subsidiary of the first mentioned corporation; and (b) the first mentioned corporation is not itself a subsidiary of any corporation.” Artinya, “Untuk tujuan Undang-Undang ini, suatu perseroan dianggap sebagai perusahaan induk dari perseroan lain jika — (a) perseroan lain tersebut merupakan anak perusahaan

Adapun dasar hukum dari Temasek dapat dikaji pada dua tingkatan, yaitu pada tingkat hukum korporasi Singapura yang ditentukan melalui *Companies Act 1967* dan Hukum Publik Singapura yang ditentukan melalui *Constitution of The Republic of Singapore*.³⁰

Di sisi lain, 1MDB tidak terdapat aturan khusus layaknya UU BUMN, namun menyesuaikan dengan peraturan korporasi di Malaysia. *Holding* tersebut berawal dari *Terengganu Investment Authority* (selanjutnya disebut dengan TIA) yang dibentuk pada tahun 2008 dan tunduk pada *Companies Act 1965 (Act 125)*,³¹ kemudian terdapat problem antara pihak Kesultanan Terengganu dengan pengelola TIA tersebut yang mengakibatkan TIA diambil alih oleh Pemerintah Pusat Malaysia melalui *Minister of Finance (Incorporation)* dari Kesultanan Terengganu pada 31 Juli 2009.³² Maka dari itu, legalitas pengambilalihan TIA oleh MoF merujuk pada *Minister of Finance (Incorporation) Act 1957* bahwa Kementerian Keuangan (selanjutnya disebut dengan Kemenkeu) Malaysia dapat membentuk, mengakuisisi, mengelola bahkan menjual badan usaha tersebut.³³

dari perseroan yang disebutkan pertama; dan (b) perseroan yang disebutkan pertama bukanlah anak perusahaan dari perseroan mana pun.”

³⁰ Christopher Chao-hung Chen, *Corporate Governance of State-Owned Enterprises: An Empirical Survey of the Model of Temasek Holdings in Singapore*, Singapore Management University School of Law Research Paper No. 6/2014, 21st Century Commercial Law Forum: 13th International Symposium 2013 (September 2013), p. 23

³¹ Malaysia, *Companies Act 1965 (Act 125)*, Ps.132 ayat (1) berbunyi, “*A director of a company shall at all times exercise his powers for a proper purpose and in good faith in the best interest of the company.*” Artinya, “Seorang direktur perusahaan harus senantiasa menggunakan kekuasaannya untuk tujuan yang tepat dan dengan itikad baik demi kepentingan terbaik perusahaan.”

Ps.132 ayat (1A) berbunyi, “*A director of a company shall exercise reasonable care, skill and diligence with (a) the knowledge, skill and experience which may reasonably be expected of a director having the same responsibilities; and (b) any additional knowledge, skill and experience which the director in fact has.*” Artinya, “Seorang direktur harus menjalankan tugasnya dengan ketelitian, keahlian, dan kecermatan yang wajar, berdasarkan: (a) kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang umumnya diharapkan dari seorang direktur dengan tanggung jawab serupa; dan (b) keahlian dan pengalaman tambahan yang memang dimiliki secara nyata oleh direktur tersebut.”

³² Bankowicz, M, *State System of Malaysia*, Czech Journal of International Relations, Vol.34, No.2 (1999), p.85–92.

³³ Malaysia, *Minister of Finance (Incorporation) Act 1957*, Ps.4 berbunyi, “*The corporation may enter into contracts and may acquire, purchase, take, hold and enjoy movable and immovable property of every description, and may convey, assign, surrender and yield up, charge, mortgage, demise, reassign, transfer or otherwise dispose of, or deal with, any movable or immovable property vested in the corporation upon such terms as the corporation seems fit.*” Artinya, “Korporasi dapat membuat kontrak dan dapat memperoleh, membeli, mengambil, memegang, serta menikmati properti bergerak dan tidak bergerak dalam segala bentuk, serta dapat mengalihkan, menyerahkan, memberikan hak jaminan, memindahkan, menyewakan, menetapkan kembali, mentransfer, atau dengan cara lain melepaskan atau mengelola properti bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh korporasi dengan ketentuan apa pun yang dianggap layak oleh korporasi.”

Berikutnya terdapat peralihan TIA menjadi IMDB pada September 2009 oleh Pemerintah Pusat Malaysia melalui MoF Inc.³⁴ Namun dalam pengelolaannya, IMDB tidak mematuhi aturan yang berlaku dalam *Islamic Financial Services Act* (selanjutnya disebut dengan IFSA) 2013 (*Act 759*),³⁵ kemudian mengakibatkan dikenai sanksi administratif.³⁶

b. Status Kepemilikan

Berdasarkan status kepemilikannya, Danantara yaitu badan hukum Indonesia yang secara penuh pemerintah miliki seperti ditegaskan dalam Pasal 3E ayat (2) UU BUMN.³⁷ Status kepemilikan penuh oleh negara ini menegaskan bahwa Danantara bukan merupakan badan swasta, melainkan bagian dari strategi pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan serta meningkatkan investasi serta tata operasional BUMN serta sumber dana lainnya.³⁸ Danantara sebagai badan hukum yang diawasi langsung oleh presiden memunculkan kemungkinan adanya intervensi politik dalam pengelolaan aset negara.³⁹ Permasalahan ini berpotensi mengganggu sifat independen dari Danantara dalam mengelola aset negara sehingga timbul ketidakjelasan mengenai batasan antara tujuan di bidang perdagangan dan politik.⁴⁰ Terkait hak dan kewenangan dari pemilik saham, yaitu negara dan badan sesuai dengan Pasal 3AB ayat (4), (5), dan (6) UU BUMN.⁴¹

³⁴ Danial Zulkifly, *SSM approved TIA to be renamed IMDB on Sept 25, 2009, says ex-CEO*, diakses dari <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/09/25/ssm-approved-tia-to-be-renamed-lmdb-on-sept-25-2009-says-ex-ceo/1794213>, diakses pada 25 Juni 2025, jam 16.43 WIB.

³⁵ Malaysia, *Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 (Act 759)*.

³⁶ Bank Negara Malaysia, *Statement on 1Malaysia Development Berhad (IMDB)*, diakses dari <https://www.bnm.gov.my/-/statement-on-1malaysia-development-berhad-lmdb->, diakses pada 25 Juni 2025, jam 18.00 WIB.

³⁷ Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.1 Tahun 2025, LN. 2025 No.25, TLN No.7097, Ps.3E ayat (2) berbunyi: "Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia."

³⁸ Al Farizy, M. R., Nugroho, F. M. dan Prakoso, B, *State Financial Position as State Equity Participation in Indonesia Investment Authority*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.3 (2024), p.1528-1541.

³⁹ Priyono, Muhammad Yogi Septiyan dkk., *Loc. Cit.*, p.3

⁴⁰ Daniel, E., dan Dalimunthe, Z, *is there a Conflict of Interest in Indonesia's SOE Investment Decision?*, BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship, Vol.6, No.2 (2024), p.253-266.

⁴¹ Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.1 Tahun 2025, LN. 2025 No.25, TLN No.7097, Ps.3AB ayat (4), (5), dan (6) UU BUMN yang berbunyi, "(4) Seluruh saham Holding Investasi dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan. (5) Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki 1% (satu persen) saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.

Pertama, negara memiliki saham sebesar 1 persen saham seri A dwiwarna dengan hak istimewa untuk menyetujui dan mengusulkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut dengan RUPS), hak untuk meminta dan mengakses data atau dokumen perusahaan, hak untuk menetapkan pedoman dalam bidang strategis, mulai dari akuntansi hingga program *environmental, social, and governance* (selanjutnya disebut dengan ESG), hak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden, dan hak lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar sebagaimana Pasal 4C ayat (3) UU BUMN.⁴² *Kedua*, badan memiliki saham sebesar 99 persen saham seri B yang memegang *holding* investasi dan *holding* operasional selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana Pasal 3A ayat (3) UU BUMN.⁴³

Sementara itu, Temasek merupakan perusahaan investasi yang dimiliki oleh Kemenkeu Singapura untuk mengelola aset negara Singapura. Akan tetapi, dalam bidang operasional, perusahaan ini bergerak secara independen, kecuali dalam hal pengelolaan aset cadangan yang mana perlu persetujuan lebih lanjut dari presiden.⁴⁴

(6) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (41) memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham seri B pada Holding Investasi”.

⁴² Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.1 Tahun 2025, LN. 2025 No.25, TLN No.7097, Ps.4C ayat (3) yang berbunyi, “(3) Saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak-hak istimewa paling sedikit sebagai berikut: a. hak untuk menyetujui dalam RUPS; b. hak untuk mengusulkan agenda RUPS; c. hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis dalam bidang: 1. akuntansi dan keuangan; 2. pengembangan dan investasi; 3. operasional dan pengadaan barang dan/atau jasa; 4. informasi teknologi; 5. sumber daya manusia; 6. manajemen risiko dan pengawasan internal; 7. hukum dan kepatuhan; 8. program tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan 9. program *environmental, social, and governance* (ESG); e. hak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden; dan f. hak lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar”.

⁴³ Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.1 Tahun 2025, LN. 2025 No.25, TLN No.7097, Ps.4C ayat (3) yang berbunyi, “(3) Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 121 dikuasakan kepada Menteri selaku pemegang saham seri A Dwiwarna dan Badan sebagai pemegang saham seri B pada Holding Investasi dan Holding Operasional, selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.”

⁴⁴ Rian Febri Pamungkas, Sholahuddin Al-Fatih, *Will Danantara Faces Success? A Comparative Studies with Temasek and Khazanah*, Jurnal Hukum Berkemadjoean, Vol.1, No.1 (Mei 2025), p.4.

Nidia Yustisia Kartika, Muhammad Bilal Prasetyo dan Mustofa Ponco Wibowo
Urgensi dan Tata Kelola Super Holding BUMN: Studi Komparatif Danantara
Indonesia, Temasek Holdings Singapura, dan IMDB Malaysia

Hal tersebut memungkinkan Kemenkeu Singapura untuk berfokus pada perannya sebagai regulator yaitu membuat kebijakan dan regulasi. Dalam hal ini, pemegang saham tunggal Temasek adalah Kemenkeu Singapura.⁴⁵ Kemenkeu Singapura dianggap sebagai badan hukum yang dapat mengajukan gugatan dan digugat atas namanya sendiri sebagaimana yang ditegaskan pada UU Menteri Keuangan Singapura Tahun 1959.⁴⁶

Di sisi lain, status kepemilikan IMDB merupakan sepenuhnya milik negara sebagai upaya strategis dalam peningkatan investasi nasional yang bersifat tunggal dan sepenuhnya di bawah kendali negara.⁴⁷ Namun kepemilikan sepenuhnya tersebut justru membawa kegagalan pengelolaan IMDB tersebut sehingga patut dicermati dan dicegah disebabkan karena tidak ada pengawasan yang jelas dan ketat, bahkan laporan audit oleh *Public Accounts Committee* (selanjutnya disebut dengan PAC) Parlemen Malaysia menyatakan bahwa dokumen tersebut bersifat rahasia dan tertutup. Hal tersebut merupakan salah satu minimnya transparansi atas korporasi yang sedang dijalankan negara.⁴⁸ Kewenangan atas kepemilikan IMDB tersebut berdasarkan Pasal 4 *MoF Inc. Act 1957* yang sepenuhnya milik dari Pemerintah Pusat Malaysia (*state-owned enterprise*) untuk mengakuisisi, memperoleh, bahkan mengelola korporasi itu.⁴⁹

⁴⁵ Nabiila Azahrah, *Mengenal Temasek Holdings, BUMN Singapura yang Jadi Rujukan BP Investasi Danantara*, diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-temasek-holdings-bumn-singapura-yang-jadi-rujukan-bp-investasi-danantara-1161478> diakses pada 26 Juni 2025, jam 12.36 WIB.

⁴⁶ Singapura, *Minister of Finance (Incorporation) Act 1959*, Ps.2 ayat (1) berbunyi, “*The Minister for the time being charged with the responsibility for finance shall be a body corporate under the name of Minister for Finance (referred to in this Act as the Corporation).*” Artinya, “Menteri yang saat ini bertanggung jawab atas urusan keuangan adalah badan hukum dengan nama Menteri Keuangan (yang disebut dalam Undang-Undang ini sebagai Korporasi).”

Ps.2 ayat (2) berbunyi, “*The Corporation may sue and be sued in its name and shall have perpetual succession and a corporate seal, and that seal may from time to time be broken, changed, altered and made a new as to the Corporation seems fit and until a seal is provided under this section, a stamp bearing the inscription Minister for Finance may be used as the corporate seal.*” Artinya, “Perusahaan dapat menggugat dan digugat atas namanya sendiri, memiliki keberlanjutan yang abadi, dan memiliki cap perusahaan, dan cap tersebut dari waktu ke waktu dapat dihancurkan, diubah, dimodifikasi, atau diganti dengan yang baru sesuai dengan kehendak Perusahaan hingga cap perusahaan disediakan sesuai dengan ketentuan pasal ini, cap yang bertuliskan Menteri Keuangan dapat digunakan sebagai cap perusahaan.”

⁴⁷ Marzuki, M. M. dan Wahid, K. A, *The Effect of Government Transformation Programme on Government Investment: Evidence from Malaysia*, *Asian Journal of Empirical Research*, Vol.12, No.1 (2022), p.1–10.

⁴⁸ Ali, A. M, *IMDB: The Causes! Part I*, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol.12, No.11 (2022), p.3066–3136.

⁴⁹ Pasal 4 *Minister of Finance (Incorporation) Act 1957*, *Loc.cit.*

c. Struktur Organisasi dan Sistem Pertanggungjawaban Korporasi

Berdasarkan struktur organisasi Danantara diatur dalam Pasal 5 PP BPI Danantara bahwa terdapat dua organ badan, yaitu dewan pengawas dan badan pelaksana.⁵⁰ Dewan pengawas diklasifikasikan keanggotaannya dalam Pasal 6 PP *a quo*,⁵¹ sedangkan badan pelaksana diklasifikasikan keanggotaannya diatur dalam Pasal 12 dan 13 PP *a quo* dengan mengedepankan unsur profesional.⁵² Persamaan dari keduanya yaitu pengangkatan serta pemberhentian dilaksanakan presiden dengan batas maksimal jabatan selama lima tahun dan maksimal dua kali periode. Namun dalam pelaksanaannya, struktur organisasi tersebut telah diimplementasikan dalam Keppres Nomor 30 Tahun 2025 *a quo*. Terkait beban pertanggungjawaban Danantara merupakan tanggung jawab Presiden, hal ini disebabkan karena badan bertanggung jawab kepada Presiden yang telah diatur melalui Pasal 2 ayat (4) PP *a quo*.⁵³

⁵⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara*, PP No. 10 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.26, TLN No.7098, Ps.5 berbunyi, “Organ Badan terdiri atas: (a) Dewan Pengawas; dan (b) Badan Pelaksana.”

⁵¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara*, PP No. 10 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.26, TLN No.7098, Ps.6 berbunyi, “(1) Dewan Pengawas terdiri atas: (a) ketua merangkap anggota; (b) wakil ketua merangkap anggota; (c) perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN, dan kementerian yang urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai anggota; dan pejabat negara atau pihak lain sebagai anggota. (2) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling rendah pejabat eselon I. (4) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.”

⁵² Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara*, PP No. 10 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.26, TLN No.7098, Ps.12 berbunyi, “Badan Pelaksana terdiri atas: (a) kepala merangkap anggota; dan (b) anggota.”

Ps.13 berbunyi, “(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berasal dari unsur profesional. (2) Seluruh anggota Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Salah satu anggota Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Kepala Badan Pelaksana oleh Presiden. (4) Masa jabatan anggota Badan Pelaksana adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya.”

⁵³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara*, PP No. 10 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.26, TLN No.7098, Ps.2 ayat (4) berbunyi, “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.”

Sementara itu, Temasek tunduk pada undang-undang perusahaan Singapura (*Companies Act 1967*) dan hukum konstitusi Singapura (*Constitution of the Republic of Singapore*). Maka, Temasek termasuk kategori perusahaan swasta karena memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai perusahaan swasta.⁵⁴ Hal tersebut berimplikasi pada struktur organisasi yang meliputi lima struktur inti, yaitu *Executive Directors and Chief Executive Officer, Deputy Executive Officer (Temasek International), Chief Investment Officer, Chief Financial Officer, dan Chief Corporate Officer*.⁵⁵ Dalam hal pertanggungjawaban, Temasek bertanggung jawab kepada pemegang saham, yakni menteri keuangan Singapura. Dalam hal ini, menteri keuangan Singapura bertugas mengawasi kinerja dan manajemen dari Temasek. Namun, perdana menteri dan menteri-menteri lainnya tidak mempunyai wewenang secara konstitusional untuk ikut serta dalam pengelolaan Temasek.⁵⁶ Selain itu, presiden memiliki peran dalam pengawasan aset cadangan Temasek supaya tidak dipergunakan tanpa persetujuan secara langsung dari presiden.⁵⁷ Persetujuan dari presiden yang sedang menjabat juga diperlukan dalam hal pengangkatan maupun pemberhentian direktur atau direktur utama.⁵⁸

⁵⁴ Singapura, *Companies Act 1967*, Ps. 18 ayat (1) berbunyi, “*A company having a share capital may be incorporated as a private company if its constitution —(a) restricts the right to transfer its shares; and (b) limits to not more than 50 the number of its members (counting joint holders of shares as one person and not counting any person in the employment of the company or of its subsidiary or any person who while previously in the employment of the company or of its subsidiary was and thereafter has continued to be a member of the company)*” Artinya, “Sebuah perusahaan yang memiliki modal saham dapat didaftarkan sebagai perusahaan swasta jika anggaran dasarnya —(a) membatasi hak untuk mengalihkan sahamnya; dan (b) membatasi jumlah anggotanya tidak lebih dari 50 (menghitung pemegang saham bersama sebagai satu orang dan tidak menghitung siapa pun yang bekerja di perusahaan atau anak perusahaannya, atau siapa pun yang sebelumnya bekerja di perusahaan atau anak perusahaannya dan kemudian tetap menjadi anggota perusahaan).”

⁵⁵ Temasek, *Our Leadership*, diakses di <https://www.temasek.com.sg/en/about-us/our-leadership#executive-management>, diakses pada 27 Juni 2025, jam 13.00 WIB.

⁵⁶ Christopher. *Loc.Cit.* p.24.

⁵⁷ Choon Yin Sam, *Understanding The Relationship Between The Government and Sovereign Wealth Funds: The Case of Singapore*, *New Zealand Journal of Asian Studies*, Vol.14, No.2 (Desember 2012), p.18.

⁵⁸ Singapura, *Constitution of the Republic of Singapore*, Ps.22C ayat (1) berbunyi, “*Notwithstanding the provisions of the memorandum and articles of association of the company, the appointment or removal of any person as a director or chief executive officer of any Government company to which this Article applies shall not be made unless the President, acting in his discretion, concurs with such appointment or removal.*” Artinya, “Meskipun terdapat ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan, penunjukan atau pemberhentian seseorang sebagai direktur atau direktur utama perusahaan pemerintah yang tunduk pada Pasal ini tidak boleh dilakukan kecuali Presiden, bertindak atas kebijaksanaannya, menyetujui penunjukan atau pemberhentian tersebut.”

Di sisi lain, 1MDB tunduk pada *MoF Inc. Act* 1957 yang mengatur pengakuisisi 1MDB oleh Pemerintah Pusat melalui MoF dan legalitas atas kewenangan yang diberikan kepada pengelola dan IFSA 2013 mengenai kewajiban untuk taat, namun pada pengelolaannya terjadi keterpurukan karena tidak menaati aturan tersebut.⁵⁹ Terkait kewenangan tersebut dilimpahkan pada tiga struktur inti organisasi, meliputi Lembaga Penasihat, Lembaga Pengarah, dan Pengurusan Tertinggi. Kewenangan tersebut sekaligus melekat sistem pertanggungjawaban dibebankan pada ketiga struktur tersebut, hal ini sebagaimana peristiwa kegagalan pengelolaan yang pernah terjadi sebelumnya.⁶⁰

C. PENUTUP

Komparasi antara Danantara, Temasek, dan 1MDB menunjukkan perbedaan yang fundamental yang terbagi pada tiga aspek, yaitu: *Pertama*, dasar hukum, pada Temasek dan 1MDB tidak diatur dalam regulasi yang spesifik seperti halnya Danantara yang memuat banyak regulasi. *Kedua*, status kepemilikan pada Temasek dan 1MDB dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan pada masing-masing negaranya, sedangkan Danantara dimiliki sepenuhnya pula oleh Pemerintah Pusat tanpa ada spesifikasi suatu kementerian. *Ketiga*, struktur organisasi dan sistem pertanggungjawaban pada ketiganya terdapat perbedaan yang signifikan, Danantara dikelola oleh Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang keduanya bertanggung jawab kepada Presiden sekaligus Presiden menjadi penanggung jawab utama Danantara, sedangkan Temasek dikelola oleh kelima struktur inti tersebut dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan Singapura sekaligus Menteri Keuangan Singapura sebagai penanggung jawab utama Temasek, adapun 1MDB dikelola oleh ketiga struktur inti tersebut sekaligus sebagai penanggung jawab 1MDB sebagaimana peristiwa kegagalan yang pernah terjadi.

⁵⁹ Bank Negara Malaysia, *Statement on 1Malaysia Development Berhad (1MDB)*, diakses dari <https://www.bnm.gov.my/-/statement-on-1malaysia-development-berhad-1mdb->, diakses pada 27 Juni 2025, jam 15.20 WIB. *Loc. cit.*

⁶⁰ Dewan Rakyat, *Dewan Rakyat yang Ketiga Belas tentang Laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara Parlemen Ketiga Belas*, DR No.13 Tahun 2016, p.14, diakses dari <https://www.parlimen.gov.my/pac/review/docs-122-146.pdf>, diakses pada 28 Juni 2025, jam 13.08 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Muchti, Fajar dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Pustaka Pelajar, Yogyakarta).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram University Press).

Publikasi

- A, Bernard, J. dan Suprajogi, A., *Status Hukum Danantara Berdasarkan Undang-Undang BUMN dalam Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.5. No. 2 (Agustus 2025).
- Chao-hung, Chen Christopher, *Corporate Governance of State-Owned Enterprises: An Empirical Survey of the Model of Temasek Holdings in Singapore*. Singapore Management University School of Law Research Paper No. 6/2014, 21st Century Commercial Law Forum: 13th International Symposium 2013 (September 2013).
- E, Daniel dan Dalimunthe, Z. *Is there a Conflict of Interest in Indonesia's SOE Investment Decision?*. BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship. Vol.6. No.2 (2024).
- I, Zahira, Hasbi, M. Z. N. dan Faris, S.. *Strengthening Economic and Development Relations Transformation Efforts Towards Golden Indonesia 2045*. Journal of Islamic Economics and Business Ethics. Vol.1. No.3 (2024).
- Jonathan, Fabian, Fajar Sugianto dan Michael, T.. *Comparative Legal Analysis On The Competence of The Indonesia's Financial Services Authority And Monetary Authority of Singapore On The Enforcement of Insider Trading Laws*. Journal of Central Banking Law and Institutions. Vol.2. No.2 (2023).
- M, Marzuki, M. dan Wahid, K. A.. *The Effect of Government Transformation Programme on Government Investment: Evidence from Malaysia*. Asian Journal of Empirical Research. Vol.12. No.1 (2022).
- M, Ali, A.. *IMDB: The Causes! Part I*. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. Vol.12. No.11 (2022).
- M, Bankowicz.. *State System of Malaysia*. Czech Journal of International Relations. Vol.34. No.2 (1999).
- Maksum, Ali.. *IMDB (IMalaysia Development Berhad), Scandal, and Its Impact on Malaysian Domestic Politics*. Politika: Jurnal Ilmu Politik. Vol.11 No.2, (Oktober 2020).
- Maula, Putri Ni'matul dkk.. *Pengawasan dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Keuangan Negara*. Jurnal Hukum Statuta. Vol.4. No. 2 (April 2025).
- Mudriko, Ahyulindo, Muhammad Ilham Rezki Wijaya, Indri Natalia dan Sri Handayani. *Dampak Kebijakan Hukum Mengenai Danantara terhadap Indeks Harga Saham Gabungan*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.2. No.4 (April 2025).
- Pamungkas, Rian Febri dan Al-Fatih, Sholahuddin, *Will Danantara Faces Success? A Comparative Studies with Temasek and Khazanah*. Jurnal Hukum Berkemadjoean. Vol.1 No.1 (Mei 2025).

- Prabowo, Adhi Setyo, dkk.. *Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia*. Jurnal Pamarator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo. Vol.13. No.1 (2020).
- Pratama, Bunga Ananda dan Sri Handayani. *Konstruksi Yuridis Danantara Indonesia: Transformasi Tata Kelola Kekayaan Negara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Kontemporer*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.8 No.1 (2025).
- Priyono, Muhammad Yogi Septiyan, dkk.. *Implikasi Hukum dan Politik dalam Pembentukan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Nasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2025).
- R, Vardhan. *National Law Development Perspective on Job Creation Law: A Critique*. Arena Hukum. Vol.17. No.2 (2024).
- R, Al Farizy, M., Nugroho, F. M. dan Prakoso, B.. *State Financial Position as State Equity Participation in Indonesia Investment Authority*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.3 (2024).
- Rezzy, Ikhwanisyah, I., Suryanti, N. dan Darmawan, A.. *Super Holding of State-Owned Enterprise (Soes) to Realize A Healthy Company Based on The Principles of Good Corporate Governance to Create the Prosperity of All Indonesian People*. Journal of Law and Sustainable Development. Vol.12. No.1 (2024).
- Rinaldi, Rinaldi, Suwito Suwito dan Guntur Eko Saputro. *Economic Program Policy BUMN In Increasing Economic Growth In Indonesia*. International Journal of Humanities Education and Social Sciences. Vol.4. No.2 (2024).
- Sam, Choon Yin. *Understanding The Relationship Between The Government and Sovereign Wealth Funds: The Case of Singapore*. New Zealand Journal of Asian Studies. Vol.14. No.2 (Desember 2012).
- Y, Susanto Machmud, N., Lukman Irwan, A., S. dan Ilmi Utami Irwan, A.. *The Implementation of Good Governance Principles in the Asset Management of Regional-Owned Enterprises of South Sulawesi Province*. KnE Social Sciences. Vol.8. No.17 (2023).

Website

- Atmadja, Deshandra Yusuf Siswan. *Urgensi Aturan Turunan Danantara dan Optimalisasi Lembaga Aset Negara*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250220190258-14-612359/urgensi-aturan-turunan-danantara-optimalisasi-lembaga-aset-negara>. diakses pada 30 Juni 2025.
- Azahrah, Nabiila. *Mengenal Temasek Holdings, BUMN Singapura yang Jadi Rujukan BP Investasi Danantara*. diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-temasek-holdings-bumn-singapura-yang-jadi-rujukan-bp-investasi-danantara-1161478>. diakses pada 26 Juni 2025.
- Bank Negara Malaysia. *Statement on IMalaysia Development Berhad (IMDB)*. diakses dari <https://www.bnm.gov.my/-/statement-on-1malaysia-development-berhad-1mdb->. diakses pada 25 Juni 2025.
- CNN Indonesia, *Daftar 7 BUMN Raksasa yang Akan Dikelola Danantara*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241122065606-92-1169378/daftar-7-bumn-raksasa-yang-akan-dikelola-danantara>. diakses pada 30 Juni 2025.

Nidia Yustisia Kartika, Muhammad Bilal Prasetyo dan Mustofa Ponco Wibowo
Urgensi dan Tata Kelola Super Holding BUMN: Studi Komparatif Danantara
Indonesia, Temasek Holdings Singapura, dan IMDB Malaysia

- Dewan Rakyat. *Dewan Rakyat yang Ketiga Belas tentang Laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara Parlemen Ketiga Belas*. DR No.13 Tahun 2016, p.14. diakses dari <https://www.parlimen.gov.my/pac/review/docs-122-146.pdf>. diakses pada 28 Juni 2025.
- Evandio, Akbar. *844 Perusahaan BUMN Diambil Alih Danantara, Termasuk Aset Strategis*. diakses dari <https://market.bisnis.com/read/20250428/192/1872743/844-perusahaan-bumn-diambil-alih-danantara-termasuk-aset-strategis>. diakses pada 24 Juni 2025.
- Subanidja, Steph. *Danantara dan Upaya Menghidupkan Potensi Aset Negara*. diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-7792739/danantara-dan-upaya-menghidupkan-potensi-aset-negara>. diakses pada 30 Juni 2025.
- Temasek. *Our Leadership*. diakses di <https://www.temasek.com.sg/en/about-us/our-leadership#executive-management>. diakses pada 27 Juni 2025.
- Wahyuni, Willa. *Prabowo Teken Keppres Danantara, Ini Susunan Pengurusnya*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/prabowo-teken-keppres-danantara--ini-susunan-pengurusnya-lt67bc730b01ed8/>. diakses pada 25 Juni 2025.
- Wau, Tuhombowo. *Danantara: Menyulam Harapan di Tengah Jebakan Sistemik Indonesia*. diakses dari https://www.kompasiana.com/tuhombowo/683f5016ed641503c428fa03/danantara-menyulam-harapan-di-tengah-jebakan-sistemik-indonesia?page=3&page_images=1. diakses pada 30 Juni 2025.
- Zulkifly, Danial. *SSM approved TIA to be renamed IMDB on Sept 25, 2009, says ex-CEO*. diakses dari <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/09/25/ssm-approved-tia-to-be-renamed-1mdb-on-sept-25-2009-says-ex-ceo/1794213>. diakses pada 25 Juni 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 225. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 26. Tambahan Lembaran Negara Nomor 7098.

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.

Malaysia, *Companies Act 1965*.

Malaysia, *Minister of Finance (Incorporation) Act 1957*.

Malaysia, *Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 (Act 759)*.

Singapura, *Companies Act 1967*.

Singapura, *Minister of Finance (Incorporation) Act 1959*.

Singapura, *Constitution of the Republic of Singapore*.

